https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

PENINGKATAN LITERASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL BAGI PEMILIH PEMULA DI MAN 3 AGAM

Yulia Ningsih[1], Bahijah binti Abas[2*], Zahara Islamika Putri[3], Mutia Andika Sukma[4], Ardilla Putri[5], Aqilah Lathifah[6], Belvi Aprilyani Putri[7], Putri Stevany Lubis[8], Ferdi Rahman Fajri[9]

[1,2] Department of Business Management and Entrepreneurship, Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

[1,3,4,5,6,7,8,9] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

Email: bahijah@fpe.upsi.edu.my

Abstrak

Siswa kelas XI madrasah aliyah berada pada usia menjelang 17 tahun, ketika kepemilikan KTP-el dan kesiapan sebagai pemilih pemula mulai relevan. Namun, literasi administrasi kependudukan (adminduk) remaja masih rendah dan MAN 3 Agam belum pernah memperoleh sosialisasi mengenai adminduk maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa kelas XI mengenai dokumen kependudukan, layanan IKD, serta keterkaitannya dengan kesiapan sebagai pemilih pemula. Kegiatan dilaksanakan pada 28 April 2026 dengan sasaran sekitar 30 siswa melalui empat tahap, yaitu persiapan, sosialisasi, diskusi dan praktik, serta evaluasi, dengan metode penyuluhan interaktif, tanya jawab, dan simulasi aplikasi IKD. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi dan respons siswa. Hasilnya menunjukkan antusiasme tinggi, terutama pada simulasi IKD. Sebagian besar siswa baru mengetahui keberadaan IKD, dan beberapa siswa menyadari bahwa keterlambatan perekaman KTP-el dapat memengaruhi kesiapan menggunakan hak pilih. Kegiatan ini menawarkan model edukasi adminduk digital berbasis simulasi di madrasah dan membuka peluang kerja sama berkelanjutan dengan Disdukcapil dan Bawaslu Kabupaten Agam.

Kata kunci: *Literasi Adminduk, Identitas Kependudukan Digital, Pemilih Pemula, KTP-El*

LATAR BELAKANG

Perkembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital menuntut warga negara, termasuk generasi muda, tidak hanya melek teknologi tetapi juga sadar hukum dan tertib administrasi sejak dini. Bagi siswa sekolah menengah yang sedang berada pada fase transisi menuju usia dewasa, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bukan sekadar identitas formal di lingkungan sekolah. Dokumen tersebut menjadi pintu masuk untuk mengakses hak-hak dasar kewarganegaraan, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan, hingga hak pilih dalam pemilihan umum (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Digitalisasi administrasi dan layanan kepada masyarakat pun mulai merambah hingga tingkat dusun, misalnya melalui pengembangan website yang memudahkan kegiatan administrasi dan akses informasi warga (Karisma et al., 2026). Secara nasional, kelompok pemilih berusia 17–30 tahun merupakan segmen terbesar, yakni 63,9 juta orang atau 31,23 persen dari 204 juta pemilih terdaftar pada Pemilu 2024 (Kompas.id, 2024). Besarnya proporsi ini menjadikan pemilih pemula kelompok yang strategis, tetapi kesiapan mereka menggunakan hak pilih sangat dipengaruhi oleh kelengkapan data kependudukan. Pada praktiknya, perekaman KTP-el bagi pemilih pemula masih menemui kendala di berbagai daerah. Lebih dari 12.000 pemilih pemula di Kota Cimahi tercatat belum memiliki KTP-el menjelang Pemilu 2024 (Ayo Bandung, 2024), dan sekitar 17.000 pemilih pemula di Kabupaten Demak belum merekam data KTP-el menjelang pilkada (Kompas.com, 2024).

Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, percepatan administrasi kependudukan digital terus didorong. Hingga Oktober 2024 tercatat 12.162.855 pengguna IKD secara nasional, dan setiap Disdukcapil se-Sumatera Barat diminta mempercepat perekaman KTP-el pemula serta memasyarakatkan aplikasi IKD (Portal Resmi Kota Bukittinggi, 2024). Di Kabupaten Agam, Disdukcapil telah beberapa kali menjalankan program jemput bola perekaman data di sekolah, antara lain di SMAN 1 Lubukbasung, SMKN 1 Kota Bukittinggi, dan SMK Perbankan Bougenville Lubukbasung (ANTARA Sumbar, 2023). Bawaslu Kabupaten Agam juga menargetkan pembukaan “kelas demokrasi” di seluruh SMA sederajat sebagai edukasi pemilih pemula menjelang Pemilu 2029. Hingga Mei 2026, program tersebut baru menjangkau tiga sekolah, yaitu MAN 5 Agam, SMAN 2 Lubuk Basung, dan SLB Lubuk Basung, dan dalam pelaksanaannya masih ditemukan siswa yang belum merekam KTP-el (ANTARA Sumbar, 2026).

MAN 3 Agam belum termasuk sekolah yang tersentuh program-program tersebut. Hingga kegiatan ini dilaksanakan, belum pernah ada sosialisasi khusus mengenai administrasi kependudukan maupun IKD bagi siswanya. Padahal, pemahaman siswa terhadap fungsi, manfaat, dan prosedur dokumen kependudukan menentukan kesiapan mereka mengakses layanan publik (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi oleh siswa masih lebih banyak diarahkan pada hiburan dan komunikasi daripada keperluan administratif-edukatif (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Kegiatan pengabdian di sekolah menengah lain yang memadukan ceramah interaktif, demonstrasi aplikasi, praktik langsung, dan diskusi reflektif dilaporkan memperoleh antusiasme tinggi dari para guru pesertanya (Kadir et al., 2026), sehingga kombinasi metode serupa layak diterapkan pada siswa.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, mitra menghadapi empat permasalahan utama: (1) kesenjangan pengetahuan teknis mengenai dokumen dan layanan kependudukan, termasuk keberadaan IKD; (2) kesadaran adminduk yang belum terhubung dengan kesiapan sebagai pemilih pemula; (3) pemanfaatan teknologi digital yang belum mengarah pada keperluan administratif; dan (4) belum adanya sosialisasi adminduk yang menjangkau MAN 3 Agam secara khusus. Kesenjangan antara dorongan digitalisasi layanan kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan minimnya edukasi langsung di tingkat sekolah ini menunjukkan perlunya edukasi yang terstruktur dan partisipatif sejak dini (Suyanto, 2013). Sepengetahuan penulis, kegiatan pengabdian yang secara khusus memadukan literasi administrasi kependudukan digital dengan kesiapan sebagai pemilih pemula pada siswa madrasah masih jarang dilaporkan.

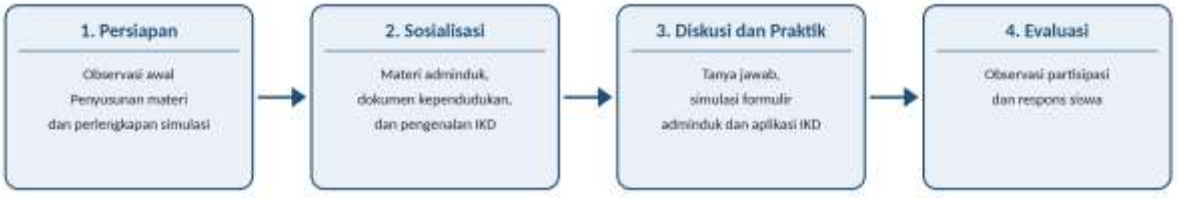
Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA
E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kegiatan PKM ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa kelas XI MAN 3 Agam mengenai jenis, fungsi, dan prosedur dokumen kependudukan serta layanan IKD, meningkatkan kesadaran mereka akan keterkaitan antara kepemilikan KTP-el dan kesiapan sebagai pemilih pemula, serta memberikan pengalaman praktis menggunakan layanan digital kependudukan melalui simulasi. Kebaruan kegiatan ini terletak pada pemaduan literasi adminduk digital, kesiapan pemilih pemula, dan simulasi langsung dalam satu rangkaian edukasi di lingkungan madrasah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan metode penyuluhan interaktif, tanya jawab, dan simulasi. Pendekatan ini sejalan dengan penyuluhan partisipatif yang memadukan ceramah interaktif dan diskusi terbuka pada kegiatan pengabdian di bidang pelayanan publik (Anggara et al., 2026), dan dipilih karena mudah dipahami siswa serta memberi ruang bagi mereka untuk bertanya dan mencoba langsung. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2026 di ruang kelas XI MAN 3 Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sasarannya adalah siswa kelas XI yang berjumlah sekitar 30 orang dan didampingi guru mata pelajaran terkait. Tim pelaksana terdiri atas satu dosen sebagai ketua dan tujuh mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dengan pembagian peran sebagai koordinator kegiatan, narahubung, surat-menyurat, pembawa acara, pemateri dan penyusun materi, dokumentasi, serta penyusun laporan. Alur kegiatan terdiri atas empat tahap yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan

A. Persiapan

Tim melakukan observasi awal di MAN 3 Agam untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang administrasi kependudukan, kemudian menyusun materi sosialisasi, media presentasi, dan perlengkapan simulasi aplikasi IKD. Materi cetak berupa leaflet edukasi juga disiapkan untuk menunjang pemahaman siswa.

B. Sosialisasi

Acara dibuka secara resmi oleh pihak sekolah, kemudian materi disampaikan secara komunikatif dan interaktif. Cakupan materi meliputi pengertian dan urgensi adminduk bagi pemilih pemula; jenis, fungsi, dan manfaat dokumen kependudukan (KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran); prosedur dan alur pengurusannya; pengenalan IKD; keterkaitan kepemilikan KTP-el dengan kesiapan sebagai pemilih pemula; serta pentingnya kesadaran adminduk sejak usia remaja.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

C. Diskusi dan Praktik

Siswa diberi kesempatan bertanya dan menyampaikan pengalaman atau kendala terkait adminduk, dilanjutkan simulasi pengisian formulir adminduk dan simulasi penggunaan aplikasi IKD. Kegiatan ditutup dengan rangkuman, kesimpulan, dan dokumentasi bersama.

D. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi aktif dan respons siswa selama sesi diskusi dan simulasi, termasuk pertanyaan, tanggapan, dan pengakuan siswa mengenai pengalaman mereka. Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen terstandar seperti *pre-test* dan *post-test*, sehingga temuan dibaca sebagai indikasi perubahan pemahaman dan kesadaran, bukan sebagai pengukuran kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan berjalan sesuai rencana melalui tahap pembukaan, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta simulasi. Kegiatan diikuti oleh siswa kelas XI beserta guru pendamping. Suasana yang komunikatif dan interaktif membuat siswa terlibat aktif sejak penyampaian materi hingga sesi praktik.

B. Pemahaman tentang Dokumen Kependudukan dan IKD

Selama penyampaian materi, siswa menunjukkan antusiasme tinggi, terutama pada sesi pengenalan dan simulasi aplikasi IKD. Sebagian besar siswa mengaku baru pertama kali mengetahui keberadaan aplikasi tersebut, padahal mereka sudah terbiasa menggunakan gawai untuk keperluan lain. Temuan ini menguatkan kondisi yang digambarkan pada analisis situasi, yaitu bahwa pemanfaatan teknologi oleh siswa lebih banyak mengarah pada hiburan dan komunikasi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Kemampuan mengoperasikan gawai belum otomatis berarti pengetahuan tentang layanan publik digital. Dengan kata lain, kesenjangan yang dihadapi siswa bersifat kesenjangan informasi dan arah pemanfaatan, bukan kesenjangan perangkat.

Kondisi ini penting dalam konteks kebijakan. Dorongan percepatan IKD di tingkat nasional dan provinsi (Portal Resmi Kota Bukittinggi, 2024) tidak akan berdampak optimal pada kelompok usia pemilih pemula apabila informasi tentang layanan tersebut tidak sampai ke sekolah. Hal yang sama berlaku pada inisiatif digitalisasi administrasi di tingkat dusun, seperti pengembangan website dusun untuk memudahkan administrasi dan akses informasi warga (Karisma et al., 2026): manfaat layanan digital baru terwujud apabila penggunanya mengetahui dan mampu memanfaatkannya. Sosialisasi langsung di sekolah, seperti yang dilakukan dalam kegiatan ini, berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan digitalisasi adminduk dan kelompok sasaran yang paling dekat dengan kebutuhan tersebut.

C. Keterkaitan KTP-el dengan Kesiapan sebagai Pemilih Pemula

Pada sesi diskusi, ketika materi dikaitkan dengan status siswa sebagai calon pemilih pemula, beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka sebelumnya belum menyadari bahwa keterlambatan perekaman KTP-el dapat memengaruhi kesiapan mereka menggunakan hak pilih.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Respons ini sejalan dengan fenomena di daerah lain, ketika ribuan pemilih pemula belum merekam data KTP-el menjelang pemilu dan pilkada (Ayo Bandung, 2024; Kompas.com, 2024), serta dengan temuan lapangan di Kabupaten Agam bahwa masih ada siswa yang belum merekam KTP-el saat program edukasi pemilih dijalankan (ANTARA Sumbar, 2026).

Perlu dicermati bahwa kepemilikan KTP-el bukan satu-satunya jalan untuk menggunakan hak pilih. Pemberitaan Kompas.id (2024) mengingatkan bahwa pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el pada kondisi tertentu tetap dapat mencoblos. Oleh karena itu, pesan edukasi yang tepat bukan bahwa tanpa KTP-el siswa pasti kehilangan hak pilih, melainkan bahwa perekaman KTP-el sejak dini memberikan kepastian dan kemudahan administratif sehingga siswa tidak bergantung pada mekanisme pengecualian. Rumusan ini perlu dijaga dalam kegiatan edukasi lanjutan agar siswa tidak memperoleh pemahaman yang keliru.

D. Simulasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk Keperluan Administratif

Pada sesi simulasi, siswa dilatih memahami alur pengisian formulir administrasi kependudukan serta tahapan dasar penggunaan aplikasi IKD. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung yang lebih praktis dibandingkan penjelasan teoretis semata. Simulasi mengarahkan perangkat yang sudah akrab bagi siswa, yaitu ponsel pintar, ke fungsi baru yang bersifat administratif dan relevan bagi kebutuhan mereka sebagai warga negara. Temuan ini sejalan dengan pelatihan digital di sekolah menengah lain yang memadukan demonstrasi aplikasi dan praktik langsung, memperoleh antusiasme tinggi dari pesertanya, dan merekomendasikan pendampingan lanjutan agar pemanfaatan teknologi berkelanjutan (Kadir et al., 2026). Dengan demikian, kegiatan ini menjawab permasalahan ketiga mengenai pemanfaatan teknologi yang belum mengarah pada keperluan administratif.

E. Capaian terhadap Permasalahan Mitra

Secara umum, kegiatan ini menjawab keempat permasalahan mitra sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan Mitra, Solusi yang Diterapkan, dan Temuan selama Kegiatan

Permasalahan mitra	Solusi yang diterapkan	Temuan selama kegiatan
Kesenjangan pengetahuan teknis tentang dokumen dan layanan adminduk	Materi jenis, fungsi, dan prosedur dokumen kependudukan serta pengenalan IKD	Sebagian besar siswa baru pertama kali mengetahui aplikasi IKD
Kesadaran adminduk belum terhubung dengan kesiapan sebagai pemilih pemula	Materi dikaitkan dengan konsekuensi politik kepemilikan KTP-el	Beberapa siswa menyadari bahwa keterlambatan perekaman KTP-el dapat memengaruhi kesiapan hak pilih
Pemanfaatan teknologi belum mengarah pada keperluan administratif	Simulasi aplikasi IKD dan pengisian formulir adminduk	Siswa antusias dan memahami alur dasar pengisian formulir serta penggunaan IKD
Belum ada sosialisasi adminduk di MAN 3 Agam	Kegiatan rintisan yang melibatkan siswa kelas XI	Kekosongan program terisi dan terbuka peluang kerja sama lanjutan

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

F. Keterbatasan dan Tindak Lanjut

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kegiatan dilakukan dalam satu sesi dengan sekitar 30 siswa sehingga cakupannya terbatas. Kedua, evaluasi dilakukan melalui observasi tanpa pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Hal ini berbeda dengan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Cikunir yang menggunakan kuesioner pra-pasca dan melaporkan kenaikan kategori pemahaman "Sangat Baik" dan "Baik" dari 20% menjadi 60% (Anggara et al., 2026), serta dengan pendampingan di madrasah aliyah yang mencatat kenaikan rata-rata skor pengetahuan dari 50,00 menjadi 73,75 melalui isian workbook (Wulan et al., 2026). Akibatnya, besarnya peningkatan pemahaman pada kegiatan ini belum dapat dikuantifikasi. Ketiga, kegiatan belum disertai pendampingan perekaman KTP-el atau aktivasi IKD secara langsung, yang memerlukan kewenangan Disdukcapil.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* pada kegiatan serupa, penyelenggaraan layanan perekaman jemput bola oleh Disdukcapil Kabupaten Agam di MAN 3 Agam, serta pelibatan MAN 3 Agam dalam program "kelas demokrasi" Bawaslu Kabupaten Agam. Kerja sama semacam ini sejalan dengan arah program yang telah dijalankan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Agam (ANTARA Sumbar, 2023; ANTARA Sumbar, 2026). Pendampingan di madrasah aliyah lain juga menekankan perlunya tindak lanjut yang lebih panjang agar ketuntasan belajar tercapai (Wulan et al., 2026).

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan, pemahaman dan kesadaran siswa kelas XI MAN 3 Agam terhadap administrasi kependudukan, termasuk IKD dan keterkaitannya dengan kesiapan sebagai pemilih pemula, menunjukkan peningkatan setelah mengikuti sosialisasi. Peningkatan ini tampak dari antusiasme siswa, pengakuan bahwa IKD merupakan informasi baru, dan kesadaran baru tentang pentingnya perekaman KTP-el tepat waktu. Kegiatan ini juga mengisi kekosongan program edukasi adminduk di MAN 3 Agam dan sejalan dengan program serupa di sekolah lain di Kabupaten Agam. Karena evaluasi masih berbasis observasi, peningkatan tersebut perlu dibaca sebagai indikasi awal.

Bagi pihak sekolah, sosialisasi adminduk dan kepemiluan sebaiknya dijadikan agenda rutin bagi siswa kelas XI dan XII. Bagi Disdukcapil dan Bawaslu Kabupaten Agam, MAN 3 Agam layak dimasukkan ke dalam program jemput bola perekaman KTP-el dan kelas demokrasi. Bagi pelaksana PKM berikutnya, evaluasi sebaiknya dilengkapi *pre-test* dan *post-test* agar dampak kegiatan dapat diukur secara kuantitatif, dengan jumlah peserta dan cakupan kelas yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi atas arahan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan, serta kepada Kepala MAN 3 Agam, majelis guru, dan siswa-siswi kelas XI atas izin, fasilitas tempat, dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, A., Fasha, M. G. N., Lesmana, T. C., & Putra, A. R. P. (2026). Penyuluhan hukum terkait penyusunan peraturan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. *CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(01), 125–128. https://doi.org/10.63922/citakarya.v4i01.3025

ANTARA Sumbar. (2023, 8 Maret). *Disdukcapil Agam lakukan perekaman data siswa di Bukittinggi*. https://sumbar.antaranews.com/berita/557877/disdukcapil-agam-lakukan-perekaman-data-siswa-di-bukittiggi

ANTARA Sumbar. (2026, 21 Mei). *Bawaslu Agam targetkan buka kelas demokrasi di seluruh sekolah*. https://sumbar.antaranews.com/berita/763005/bawaslu-agam-targetkan-buka-kelas-demokrasi-di-seluruh-sekolah

Ayo Bandung. (2024, 27 Januari). *12 ribu lebih pemilih pemula di Kota Cimahi belum punya KTP elektronik, jelang Pemilu 2024, ini upaya pemerintah daerah*. https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7911682986/12-ribu-lebih-pemilih-pemula-di-kota-cimahi-belum-punya-ktp-elektronik-jelang-pemilu-2024-ini-upaya-pemerintah-daerah

Kadir, A., Arisa, Ebe, A., Umar, R., & Hasniaty. (2026). Pelatihan pemanfaatan AI untuk pembelajaran dan asesmen di sekolah: Studi kasus di SMAN 5 Wajo. *CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(02), 84–92. https://doi.org/10.63922/citakarya.v4i02.4031

Karisma, Y. I., Mone, F., Ina, D., Dendo, V., Ghada, M. J., Kaka, M., Mahardika, S., Kaka, M. P., Madu, P. D., Kaka, P., & Sigit, N. (2026). Implementasi website dusun sebagai sarana informasi digital dan administrasi masyarakat di Dusun Sumbersari Desa Jambangan. *CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(01), 54–61. https://doi.org/10.63922/citakarya.v4i01.2942

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Literasi Digital Nasional 2021*. Kominfo.

Kompas.com. (2024, 19 November). *Jelang Pilkada, 17.000 pemilih pemula di Demak belum rekam data e-KTP*. https://regional.kompas.com/read/2024/11/19/131159178/jelang-pilkada-17000-pemilih-pemula-di-demak-belum-rekam-data-e-ktp

Kompas.id. (2024, 5 Februari). *Tak punya KTP elektronik, pemilih pemula tetap bisa mencoblos*. https://www.kompas.id/artikel/en-tak-punya-ktp-el-pemilih-pemula-tetap-bisa-mencoblos

Portal Resmi Kota Bukittinggi. (2024, 11 Oktober). *H. Hani S. Rustam dorong Dukcapil se-Sumatera Barat genjot perekaman KTP-el pemilih pemula*. https://www.bukittinggikota.go.id/news_detail/2079/

Suyanto, B. (2013). *Masalah sosial anak* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Wulan, I. A. D. P., Nugrahani, D. S., & Probowati, A. (2026). Project-based mentoring to improve scientific writing competence among madrasah students. *CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(03), 67–79. https://doi.org/10.63922/citakarya.v4i03.6175

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.